



Bukukan Aset Rp 1,2 Triliun



PRESTASI: Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara saat menerima Ketua BKS LPD Periode 2011-2015, AA Kompiang Gede Ardana, di kantor Wali Kota, kemarin.

LPD Se-Kota Denpasar Lakukan Penyegaran

DENPASAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar tak henti melakukan pembinaan kepada LPD di ibu kota provinsi Bali ini. Ini dimaksudkan guna meningkatkan peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pergerakan perekonomian masyarakat desa.

Hasil pembinaan Pemkot Denpasar tersebut dapat dilihat dari total aset LPD di Kota Denpasar yang banyaknya sekitar 35 LPD. Total aset dari ke 35 LPD yang ada di Kota Denpasar tersebut pada akhir bulan Desember 2014 tercatat mencapai Rp 1,2 triliun.

Total aset LPD di akhir Desember 2014 ini mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 525 miliar. Hal ini diungkapkan Ketua

ua BKS LPD Periode 2011-2015, AA Kompiang Gede Ardana saat audiensi dengan Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, di Kantor Walikota Denpasar, Senin (9/10).

Selain itu, kata Ardana, peningkatan jumlah aset LPD ini juga tidak terlepas dari rasa memiliki dan animo masyarakat Kota Denpasar terhadap LPD di masing-masing Desa Pekraman. Sehingga sebagai timbal balik atas peningkatan aset tersebut, kata Ardana, BKS LPD Kota Denpasar, memiliki program dalam pembiayaan berbagai upacara keagamaan. Seperti Ngaben Masal, Mernukur Masal, Metatah Masal. "Selain itu LPD Kota Denpasar juga

mendanai pembangunan fisik di Desa Pekraman," katanya.

Ditambahkan, untuk meningkatkan mutu manajemen dan pengawasan aset yang ada, BKS LPD Kota Denpasar telah membuat berbagai program. Seperti, melakukan penyegaran dengan memilih pengurus baru. "Pengurus baru ini akan

sangat membantu masyarakat. "Mudah-mudahan pada HUT ke 17 ini BKS LPD Kota Denpasar bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada warganya. Saya merasa bangga karena semua LPD Kota Denpasar sangat sehat hingga aset yang tercatat mencapai Rp 1,2 triliun," terangya. (ayu/rid)

dilantik pada Sabtu (14/11) mendatang di Ksiarnawa Art Center," ujarnya.

Sementara itu, menurut Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, dari segi ekonomi LPD mengalami peningkatan dan sangat membantu masyarakat. Selain itu dari segi sosial dan kebudayaan LPD pun dirasanya



Dispenda Sulit Tindak Moge Bodong

ADA pengakuan menarik ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bali I Made Santha. Mantan Asisten III Provinsi Bali ini menegaskan bahwa terkait pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor dengan CC besar, seperti moge, dia menyatakan sangat kesulitan. "Kami hanya menarik pajak bagi pemilik moge yang sudah diregistrasi dan memiliki dokumen sah dari pihak kepolisian Polda Bali," tegas Santha.

Terkait adanya indikasi sejumlah moge bodong

► Baca *Dispenda...* Hal 31

Rugikan Pajak Rp 1,7 Miliar Per Tahun

■ DISPENDA...

Sambungan dari hal 21

belum teregistrasi dan belum adanya dokumen dari keberadaan moge di Bali, pihaknya sulit mengidentifikasi. "Kalau belum tercatat dan belum ada dokumen, kami tentu kesulitan melakukan identifikasi dan pendataan. Termasuk jika ingin menarik pajak, dasar kami juga tidak ada. Dari mana akan kami pungut pajak?" terangnya dengan nada tanya.

Namun demikian, Santha

berharap bukan hanya moge. Tapi juga bagi seluruh pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban dengan membayar pajak. "Pembangunan infrastruktur kan butuh biaya perawatan, dan itu semua bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tentu sebagai bentuk tanggung jawab, kami juga harapkan kesadaran. Sedangkan untuk keabsahan, tentu itu menjadi ranah kepolisian," tambahnya.

Lalu, berapa sebenarnya total moge di Bali dan besaran

hasil pajak yang diperoleh dari moge? Ditanya demikian, Santha mengaku tidak hafal. Dia pun meminta *Jawa Pos Radar Bali* untuk menghubungi Kabid Pajak Dispenda Bali Made Mantra. Sayang, saat dikonfirmasi Mantra mengaku sudah pulang dari kantor. "Kalau data semua ada di kantor, jika berkenan besok (hari ini) kami tidak berani menyampaikan secara umum, karena keterkaitannya dengan data," jelasnya, meminta permakluman.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun koran ini, dari data 2011, Dispenda Provinsi Bali mencatat dari total 712 unit moge yang beroperasi di Bali. Dari jumlah itu, sebanyak 342 unit tidak mengantongi surat kelengkapan dan tidak pernah membayar pajak.

Bahkan, akibat banyaknya moge bodong, itu Pemprov Bali dirugikan Rp 1,7 miliar per tahun. Dengan asumsi pajak per unit moge sebesar Rp 5 juta. (pra/pit)

Edisi : Selasa, 10 November 2015

Hal. : 21 dan 31